Ecoplan Vol. 6 No. 2, October 2023, p. 100-117
ISSN p: 2620-6102; e: 2615-5575

Mengupas Kemiskinan di Provinsi Banten: Bagaimanakah Peran Faktor Kependudukan dan Ekonomi?

Ine Ratna Dewi
Program Diploma Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia
E-mail corresponding author: ineratnadewi@gmail.com

Ecoplan

Submitted: June 24, 2023
Accepted: Oct 27, 2023
Published: Oct 30, 2023

Abstrak – *This study aims to analyze the simultaneous and partial effects of population and economic factors on poverty in Banten Province for the 2011-2019 period. Population factors include population growth rate, population density, and sex ratio. Meanwhile, economic factors cover the open unemployment rate, HDI, and GRDP. With secondary data from the publication page of Statistics Indonesia in Banten Province, this research was conducted using a descriptive quantitative approach. To analyze the data, the study used panel data regression analysis. The econometric model was estimated using the Ridge Regression model to overcome the multicollinearity problem between variables in the study. The statistical test results showed that the variables of population growth rate, open unemployment rate, sex ratio, human development index, and GRDP were reported to simultaneously and significantly affect poverty in Banten Province during 2011-2019. Partially, several variables, such as population growth rate, open unemployment rate, and HDI each had a significant negative effect on poverty. Interestingly, other variables, like the sex ratio, had a significant positive effect on poverty. The variables of population density and Gross Regional Domestic Product (GRDP) did not affect poverty. This study indicated that to reduce poverty, the Banten Provincial government should focus on improving the quality of human resources. They should improve health, education, skills, and expertise. Thus, people can have the competence to compete and obtain better jobs, which in turn can increase their income and welfare. In this way, they are expected to get out of the poverty cycle.*

Keywords: ***GRDP; HDI; Population's Growth; Poverty; Sex Ratio.***

Abstract *– Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh simultan dan parsial atas faktor kependudukan dan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Banten periode 2011-2019. Faktor kependudukan meliputi laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin, sementara faktor ekonomi mencakup tingkat pengangguran terbuka, IPM dan PDRB. Dengan menggunakan data sekunder dari laman publikasi BPS Provinsi Banten, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan analisis regresi data panel. Model ekonometrika diestimasikan dengan menggunakan Ridge Regression Model dalam mengatasi masalah multikolinearitas antar variabel dalam penelitian. Hasil uji statistik menunjukan variabel laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, rasio jenis kelamin, indeks pembangunan manusia dan PDRB secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten periode 2011-2019. Secara parsial, variabel laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan IPM masing-masing berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sementara variabel rasio jenis kelamin berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Adapun variabel kepadatan penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk menurunkan kemiskinan, pemerintah Provinsi Banten agar memfokuskan kebijakannya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal peningkatan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan keahlian. Dengan demikian, masyarakat memiliki kompetensi untuk bersaing dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup sehingga tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.*
Kata Kunci: IPM; Kemiskinan; Laju Pertumbuhan Penduduk; PDRB; Rasio Jenis Kelamin.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang (Nyasulu, 2010). Dampaknya tidak hanya merugikan individu dan keluarga, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, mengancam stabilitas sosial, serta memperburuk ketidaksetaraan. Menurut laporan World Bank, pada tahun 2021, lebih dari 9% populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per hari (Bank Dunia, 2021). Tingkat kemiskinan di suatu wilayah menjadi cerminan tingkat kesejahteraan penduduknya (Leasiwal, 2013). Kemiskinan juga seringkali terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan yang rendah, dan akses terbatas terhadap layanan dasar. Semakin banyak penduduk miskin dalam suatu wilayah maka semakin rendah tingkat kesejahteraan wilayah tersebut, dan sebaliknya. Bahkan, Nurkse menggambarkan kemiskinan sebagai lingkaran setan yang mendorong suatu negara untuk tetap dalam kondisi miskin (Jhingan, 2016). Oleh karena itu, tingginya angka kemiskinan merupakan hambatan serius dalam pembangunan ekonomi.

Penanganan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), dunia telah berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini memungkinkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara masif dan simultan di seluruh dunia. Selama periode 1990-2019, dunia telah membuat kemajuan yang cukup signifikan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dari sekitar 38% menjadi 8,5% (The World Bank, 2023). Terlepas dari kemajuan ini, tantangan kemiskinan masih sangat nyata, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia turut mengalami permasalahan kemiskinan yang cukup pelik karena adanya paradoks *poverty in the midst of plenty* seperti yang dikemukakan oleh Keynes (S. E. Safitri et al., 2022). Ditengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih belum berhasil sepenuhnya dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah telah berupaya keras meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha mikro. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan mengentaskan berbagai bentuk kemiskinan. Dengan populasi yang besar dan beragam tingkat kemiskinan di seluruh negeri, peran Indonesia dalam upaya global mengentaskan kemiskinan sangat signifikan.

Salah satu aspek menarik yang layak diselidiki adalah Provinsi Banten di Indonesia. Tahun 2022 menandai keberadaan 38 provinsi di Indonesia, dan di antara mereka, Provinsi Banten memperlihatkan variasi yang signifikan dalam tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota, menunjukkan ketidakstabilan dalam pergerakan jumlah kemiskinan Provinsi Banten (Pradipta et al., 2020). Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu, Provinsi Banten menjadi objek penelitian yang menarik karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan ekonomi di tingkat provinsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan, tidak hanya di Banten, tetapi juga di seluruh Indonesia.

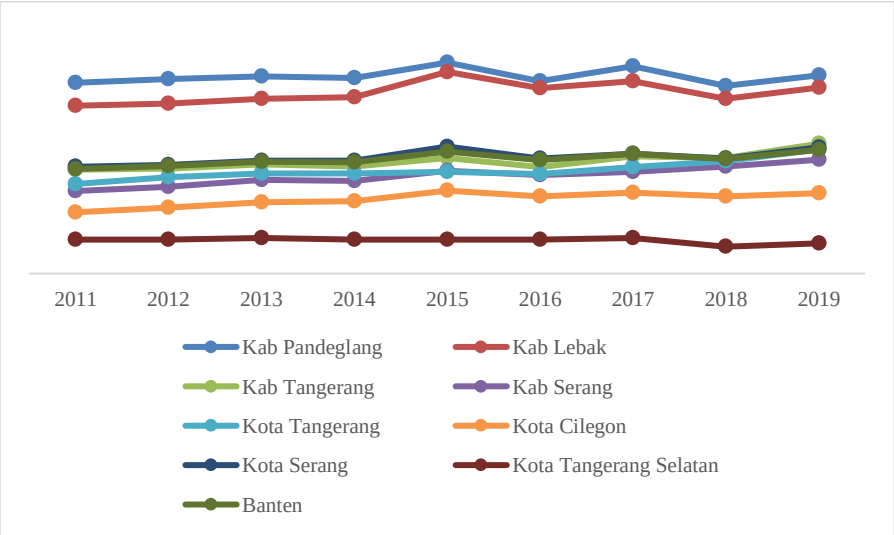

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Banten, 2023.

Grafik 1 Persentase Kemiskinan di Provinsi Banten Periode 2011-2019

Grafik 1 menunjukan bahwa pada periode 2011-2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung fluktuatif dengan perbedaan yang besar antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini mengindikasikan ketidakmerataan antar wilayah dimana tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang sementara tingkat kemiskinan terendah di Kota Tangerang Selatan. Adanya *gap* yang tinggi antar wilayah akan menghambat kemajuan dan perkembangan di Provinsi Banten. Sebagai salah satu Provinsi termuda di pulau Jawa, Banten menduduki posisi kedua sebagai Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di pulau Jawa dan posisi 10 besar di lingkup nasional (Provinsi Banten, 2021). Berita Resmi Statistik nomor 35/07/36/Th.XVI edisi Maret 2022 melaporkan terdapat setidaknya terdapat 814,02 ribu jiwa atau sekitar 6,16% penduduk miskin di Provinsi Banten. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,34% dibanding persentase penduduk miskin per September 2021 dan juga menurun 0,5% dibandingkan Maret 2021 (BPD Provinsi Banten, 2022). Namun, ditengah penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Banten, ketidakmerataan tingkat kemiskinan antara kota dan kabupaten di Banten masih termasuk tinggi.

Tingginya kemiskinan dapat menyebabkan permasalahan sosial yang menurunkan kualitas sumber daya manusia, menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial, serta meningkatnya angka kriminalitas. Melihat dampak sistemik dan destruktif yang ditimbulkan, kemiskinan menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Berbagai penelitian terdahulu mencoba menjelaskan metode pengukuran kemiskinan. Penelitian kemudian berkembang untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di suatu wilayah. Solihin (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan 3 (tiga) penyebab kemiskinan di Provinsi Banten yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat pengangguran, tingkat inflasi, serta terbatasnya sumber daya alam. Sementara, penelitian Wenagama dan Yanthi (2022) menambahkan penyebab lainnya dari kemiskinan berupa rendahnya pendapatan daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta jumlah penduduk yang terlalu banyak. Hal ini sejalan dengan studi Fauzi et al (2022) dimana setiap kenaikan 1% pada pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0,53%.

Ristika et al (2021) mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur berupa jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, serta IPM yang secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur. Namun ternyata kemiskinan sebagaimana kompleksitas masalahnya dipengaruhi pula oleh faktor lainnya seperti produk domestik regional bruto (PDRB) dan subsidi pemerintah (S. E. Safitri et al., 2022). Dalam periode 2011-2019, PDRB Provinsi Banten terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Banten tidak mencerminkan PDRB Provinsi Banten yang tinggi. Padahal PDRB merupakan salah satu indikator perekonomian dan tolok ukur kesejahteraan masyarakat (Kuncoro, 2013).

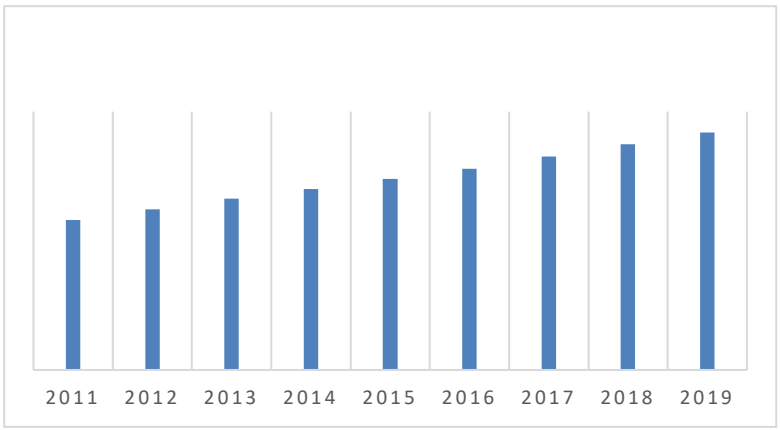

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Banten, 2023.

Grafik 2 PDRB ADHK Provinsi Banten Periode 2011-2019 (dalam juta rupiah)

Berbagai studi terdahulu menunjukan pengaruh jumlah penduduk sebagai determinan kemiskinan. Faktor kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bahkan teori ekonomi klasik memandang jumlah penduduk sebagai faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian karena semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia di lapangan. Peningkatan tenaga kerja ini akan meningkatkan output produksi barang dan jasa. Meski demikian, dalam perkembangannya pertumbuhan penduduk yang terlalu besar dapat membawa dampak yang kurang baik bagi perekonomian yang akhirnya meningkatkan kemiskinan. Utamanya hal ini terjadi ketika penambahan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan dan

kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga peningkatan jumlah penduduk meningkatkan pengangguran dan kemiskinan secara simultan.

Penelitian ini mencoba untuk menggali beberapa hal secara lebih mendalam. Pertama, dari segi subjek penelitiannya, penelitian ini menjadi penting karena pada penelitian sebelumnya, bahasan mengenai determinasi faktor kependudukan dan faktor ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2011-2019 masih terbatas. Kedua, dari sisi variabel yang digunakan, penggunaan rasio jenis kelamin sebagai salah satu determinan atas kemiskinan di Provinsi Banten pun masih terbatas. Hal ini menarik mengingat mayoritas penduduk di Provinsi Banten adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Lebih lanjut, penelitian ini juga penting untuk menjadi validasi bagi penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal yang sama, dimana kebanyakan penelitian sebelumnya mencoba untuk mengukur pengaruh faktor ekonomi terhadap kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, fokus penelitian pada Provinsi Banten menjadi penting agar dapat digunakan untuk perkembangan dan kemajuan pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Penelitian ini juga relevan dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi nasional, karena akan membantu pemerintah pusat dalam merinci masalah ketidaksetaraan yang berbeda antarprovinsi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan kemiskinan di tingkat provinsi, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi benar-benar merata dan berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini merupakan langkah penting menuju pemahaman yang lebih baik tentang peran regional dalam mengatasi masalah global.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS RI, 2023). World Bank (2023) menentukan batas penghasilan sebesar 1 USD per kapita per hari untuk mengkategorikan kemiskinan. Lebih lengkap, Todaro dan Smith (2011) memandang kemiskinan sebagai suatu konseptual yang terdiri atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, air, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Sementara kemiskinan relatif merujuk pada kondisi yang disebabkan karena pengaruh suatu kebijakan yang belum mampu menjangkau masyarakat secara merata yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat. Determinan kemiskinan cukup beragam, namun secara garis besar dikategorikan menjadi dua penyebab utama (Asmara & Suci, 2014). Pertama, kemiskinan kultural yang disebabkan faktor adat dan budaya wilayah yang mengikat penduduknya dan melekat dengan indikator kemiskinan. Dan kedua, kemiskinan struktural yang disebabkan kondisi struktur dan tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan.

Peningkatan angka kemiskinan berpotensi menimbulkan masalah lainnya seperti ketimpangan dan kecemburuan sosial, penurunan kualitas sumber daya manusi, serta peningkatan tindakan kriminal (Utami et al., 2022). Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Konsep Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan, sehingga dalam prosesnya harus mempertimbangkan kondisi penduduk itu sendiri. Pentingnya penduduk dalam proses pembangunan ekonomi menjadi dasar pemerintah untuk melakukan proses pembangunan sumber daya manusia yang diwujudkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Teori pertumbuhan Solow memandang penduduk sebagai bagian dari faktor produksi yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Lebih lanjut menurut Kuznet, penduduk ikut berperan dalam meningkatkan output agregat melalui kegiatan konsumsi, investasi, dan produksi. Sebagai pelaku ekonomi, penduduk sangat berperan dalam menentukan arah perekonomian suatu wilayah (Sasana & Rudibdo, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk sesuai dengan perannya memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Malthusian yang diajukan oleh Thomas Malthus pada abad ke-18 mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melebihi laju pertumbuhan sumber daya yang tersedia sehingga berpotensi menyebabkan kemiskinan dan kelaparan (Todaro & Smith, 2014). Bagi penganut Teori Malthus, pertumbuhan penduduk adalah hal negatif yang menyebabkan bertambahnya beban pemerintah. Dikarenakan keterbatasan pangan dan kemampuan dunia dalam mengakomodasi kebutuhan manusia, Teori Malthus menyarankan perlu adanya pembatasan penduduk (Todaro & Smith, 2011). Tanpa adanya pembatasan pada pertumbuhan penduduk maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan yang menjadi sumber kemelaratan dan kemiskinan (Ruchmawati & Tuasela, 2017). Hal ini dibuktikan melalui

data empiris di Irlandia dimana sekitar 2 juta jiwa penduduknya mati kelaparan akibat kegagalan panen kentang pada tahun 1845 (Kabul, 2019).

Faktor kependudukan seperti laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin, memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk pun dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kemiskinan. Kepadatan penduduk merujuk perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah (Urrahman et al., 2022). Pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, masyarakat mengalami penurunan kualitas hidup dan peningkatan angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan sedangkan lahan yang tersedia tidak mengalami perubahan sehingga menimbulkan keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk pemukiman maupun aktivitas penduduk. Tidak hanya itu, wilayah padat penduduk menyebabkan harga hunian dan biaya hidup mengalami peningkatan. Padahal penghasilan masyarakat cenderung tetap. Selain itu, kepadatan penduduk yang tidak terkendali berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti sumber daya dasar yang semakin terbatas, fasilitas sosial dan kesehatan yang kurang memadai, serta lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi bagi angkatan kerja yang ada. Kepadatan penduduk yang tinggi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan mengakibatkan tekanan pada sistem kesehatan, memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat yang rentan. Lebih lanjut, hal ini menambah beban finansial bagi masyarakat karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan keluarganya.

Selanjutnya, rasio jenis kelamin menunjukan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan per 100 penduduk perempuan. Umumnya, penduduk laki-laki memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Dengan demikian, rasio jenis kelamin yang lebih besar menunjukan peran laki-laki sebagai kepala keluarga yang bekerja dan mencari penghasilan. Sementara, menurut Ramadhani et al (2019), ketika rasio jenis kelamin lebih besar dari 100 maka wilayah tersebut memiliki ketersediaan lapangan pekerjaan yang tinggi sehingga tidak terjadi migrasi keluar, dan sebaliknya. Namun, ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempun juga dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Perempuan kerap mengalami diskriminasi dalam memperoleh haknya sebagai manusia, seperti memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menyebabkan peran perempuan semakin terbatas dan terpinggirkan.

Konsep Ekonomi dan Kemiskinan

Perekonomian memiliki pengaruh secara langsung terhadap masyarakat dimana kondisi ekonomi yang baik akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Negara & Putri, 2020). Dalam hal ini, indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saling berhubungan serta memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu wilayah.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah (Oktaviana & Amalia, 2018). Dalam konteks regional, pertumbuhan ekonomi umumnya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berlokasi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (Marini, 2016). Faktor produksi ini meliputi tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa (Shalehah et al., 2017). PDRB menggambarkan peningkatan produksi ekonomi regional dari waktu ke waktu. Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi, khususnya ketika berkelanjutan dalam jangka panjang, dapat memberikan sumber daya yang lebih bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memperbaiki standar hidup masyarakat (Shaulim, 2022).

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menggambarkan kegagalan pembangunan di suatu wilayah dan turut mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Sari, 2021). Menurut BPS (2021), tingkat pengangguran terbuka menunjukan jumlah pengangguran per 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Keberadaaan pengangguran yang tidak terkendali mengganggu stabilitas dan keberlangsungan perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Banten (Hartati, 2020). Secara umum, ketika seseorang menganggur maka penghasilan yang biasa digunakan untuk mencukup kebutuhan pokok pun menjadi terhenti dan membuatnya masuk dalam kategori miskin (Utami et al., 2022). Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan pengangguran akan disertai dengan peningkatan angka kemiskinan, dan sebaliknya.

Selain PDRB dan tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia pun umum digunakan sebagai determinan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia, disingkat IPM, mengukur kualitas hidup suatu wilayah dengan menggunakan komponen dasar seperti umur panjang, pendidikan dan kehidupan yang layak (Nurlita et al., 2017). Pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama dan saling terkait

memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dengan pendidikan yang memadai maka masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan umumnya dikaitkan dengan peningkatan penghasilan dan daya beli masyarakat. Jika penghasilan dicerminkan sebagai produktivitas, semakin tinggi pendidikan yang diperoleh maka semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Sementara, kesehatan berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang sehat dan produktif sehingga meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Dengan kondisi fisik yang sehat serta produktivitas dan partisipasi kerja yang tinggi, maka upah yang diperoleh pun semakin besar. Lebih lanjut, penghasilan yang lebih besar membawa masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian, dalam konteks kesejahteraan sosial, semakin tinggi nilai IPM di suatu wilayah maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, dan sebaliknya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan atas penemuan dan teori inovatif yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kajian atas determinan kemiskinan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti Maipita (2014) yang mengungkapkan determinan kemiskinan di suatu wilayah meliputi rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi, terbatasnya sumber daya alam, tingginya pertumbuhan penduduk, serta tidak kondusifnya stabilitas politik.

Lebih lanjut, penelitian Kristiana (2021), Rahma et al (2022), dan Seran (2017) membahas hal serupa di wilayah yang berbeda. Wenagama dan Yanthi (2022) meneliti determinan kemiskinan di Provinsi Bali dengan kesimpulan tingkat pendidikan, pertumbuhan penduduk, dan distribusi pendapatan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Bali secara signifikan.

Penelitian lain dilakukan oleh Berliani (2021) di Jawa Barat dengan menggunakan metode analisis regresi berganda yang meneliti pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2020. Hasilnya menunjukan bahwa seluruh variabel independen mempengaruhi kemiskinan secara signifikan sebesar 99,9%.

Tidak hanya itu, penelitian kemiskinan juga dilakukan dalam lingkup 33 provinsi dengan variabel independen berupa tingkat pengangguran terbuka, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan IPM. Hasil penelitian mengungkapkan pengaruh negatif IPM terhadap kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2011-2015 (Zuhdiyati et al., 2017).

Oleh karena itu, kerangka penelitian ini sebagai berikut.

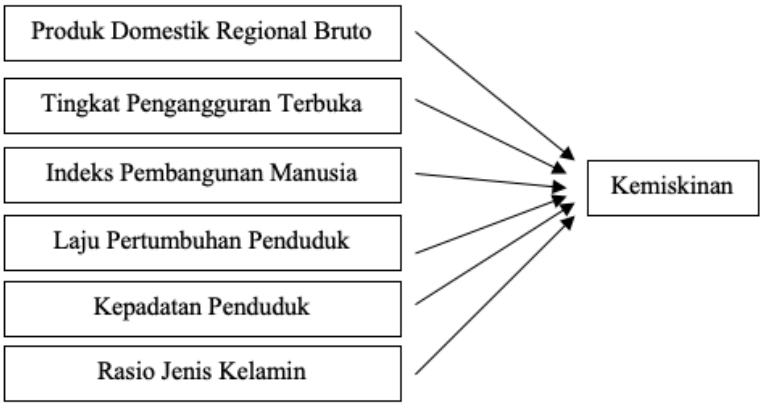

Sumber: Diolah penulis, 2023.

Gambar 1 Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Menurut Jaya (2020), dalam penelitian kuantitatif hubungan antar variabel penelitian dianalisis menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Sementara metode regresi data panel digunakan untuk untuk mengetahui hubungan linear antara variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Sihombing, 2022).

Penelitian menggunakan data tahun 2011 sampai dengan 2019 pada 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Pemilihan periode penelitian hingga tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang

terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2022, sehingga dikhawatirkan akan memberikan hasil yang bias. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS Provinsi Banten dimana data yang tidak tersedia pada tahun tertentu dilengkapi dengan menggunakan interpolasi data. Variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Variabel

Variabel	Satuan	Skala	Transformasi Data
Variabel Dependen			
Kemiskinan (KM)	Persentase	Rasio	-
Variabel Independen			
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase	Rasio	-
Tingkat kepadatan penduduk (KP)	Jiwa/km^2	Rasio	Logaritma Natural
Rasio Jenis Kelamin (RS)	Persentase	Rasio	-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Indeks	-
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	Rasio	-
Produk Domestik Regional Bruto (RDRB)	Juta	Rasio	Logaritma Natural

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Banten, 2023

Selanjutnya, pengolahan data penelitian menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* dan program STATA 17. Model dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 LPP_{it} + \beta_2 ln\, KP_{it} + \beta_3 RS_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 \ln PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

KM : Penduduk miskin
LPP : Laju pertumbuhan penduduk
KP : Tingkat kepadatan penduduk
RS : Rasio jenis kelamin
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
TPT : Tingkat pengangguran terbuka
PDRB : Produk domestik regional bruto
ε : Variabel pengganggu (*error term*)
i : Kabupaten/kota ke-i
t : Periode waktu (2011, …, 2019)

Agar model penelitian memiliki varians yang tidak bias dan koefisien yang dihasilkan linear, model penelitian harus memenuhi asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Oleh karean itu, sebelum pengujian dilakukan maka data terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi seperti yang dimuat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	H_0	H_1
Skewness and Kurtosis Tests	Data terdistribusi normal	Data tidak terdistribusi normal
Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test	Varian data Homoskedastis	Varian data Heteroskedastis
Breusch–Godfrey LM test	Model tidak autokorelasi <10	Model autokorelasi ≥10
Variance Inflation Factor (VIF)	Data bebas multikolinearitas	Data terdapat multikolinearitas

Data yang telah memenuhi uji asumsi klasik kemudian memasuki tes *goodness-of-fit (*GOF) yang menggambarkan tingkat kecocokan model dengan observasi yang dilakukan (Maydeu-Olivares & Forero 2010). Uji GOF dilakukan dengan tingkat alpha = 5% sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji *Goodness of Fit*

Uji *Goodness of Fit*	H_0	H_1	
Uji Parsial	Variabel Independen secara parsial tidak berpengaruh	Variabel Independen secara parsial berpengaruh	
Uji Simultan	Seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh	Seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh	
	Kuat	Moderat	Lemah
Adjusted R-Squared	>0,67	0,67<R-Squared<0,33	<0,33

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan data mengenai variabel dependen dan variabel independen yang meliputi jumlah observasi, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, serta nilai maksimum.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen

Variable	Obs	Mean	Std. dev	Min	Max
KM	72	5,653194	2,513494	1,33	10,43
Ln PDRB	72	17,44256	0,686147	16,37926	18,52104
Ln KP	72	7,642518	1,261885	5,883322	9,580938
IPM	72	69,60903	6,112085	59,82	81,48
TPT	72	9,626528	2,499661	4,56	14,8
RS	72	104,1022	1,185282	101,32	105,5
LPP	72	1,834861	1,053021	0,24	3,67

Sumber: Data olahan STATA, 2023.

Hasil pengujian di atas menunjukkan hasil analisis deskriptif. Secara rata-rata, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten sebesar 5,653194% dengan standar deviasi yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat variasi dalam variabel tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan terendah sebesar 1,33% dicapai oleh Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018, sementara tingkat kemiskinan tertinggi besar 10,43% dicapai oleh Kabupaten Lebak pada tahun 2015.

Terdapat enam variabel independen dalam penelitian ini. Pertama, variabel laju pertumbuhan penduduk dengan nilai terendah sebesar 0,24% di Kabupaten Lebak dan nilai tertinggi sebesar 3,67% di Kota Tangerang Selatan. Dengan nilai rata-rata sebesar 1,834861% dan standar deviasi yang lebih rendah maka variabel laju pertumbuhan penduduk memiliki tingkat variasi yang cukup rendah. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan tidak hanya disebabkan angka kelahiran yang tinggi, melainkan akibat dari urbanisasi (Huda, 2013). Untuk variabel rasio jenis kelamin, nilai terendah sebesar 101,32%, nilai rata-rata sebesar 104,1% dan standar deviasi yang cukup rendah sebesar 1,185282. Terdapat hal yang menarik, selama periode 2011-2019, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki rasio jenis kelamin diatas 100 yang berarti mayoritas penduduknya adalah laki-laki. Hal ini mengindikasikan tingginya produktivitas laki-laki sebagai pencari penghasilan utama sekaligus tingginya angka migrasi ke wilayah Provinsi Banten. Menurut Santika (2023), Provinsi Banten menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi dengan tingkat migrasi ke dalam tertinggi di Indonesia.

Selanjutnya, variabel kepadatan penduduk yang memiliki satuan jiwa/km^2, sehingga penulis melakukan transformasi nilai kepadatan penduduk ke nilai logaritma natural untuk menyamakan satuan. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten bervariasi dengan nilai tertinggi 9,58% ke nilai terendah 5,88% dan nilai rata-rata sebesar 7,64%. Kota Tangerang secara konsisten menjadi wilayah dengan kepadataan penduduk tertinggi, sementara wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kabupaten Lebak. Adapun variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki rata-rata 9,63% dengan nilai tertinggi sebesar 14,8% dan nilai terendah sebesar 4,56%.

Untuk variabel produk domestik regional bruto (PDRB) yang memiliki satuan juta, maka penulis kembali melakukan transformasi nilai ke nilai logaritma natural untuk menyamakan satuan. PDRB memiliki rata-rata 17,44 juta dan nilai tertinggi sebesar 18,5 juta. Variabel terakhir merupakan indeks pembangunan manusia (IPM) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 69,60 dan nilai tertinggi sebesar 81,84.

Pemilihan Model Penelitian

Untuk menentukan model regresi terbaik dilakukan pemilihan model data panel menggunakan uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier seperti dimuat dalam Tabel 5. Hasil pengujian menunjukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* dengan rincian hasil pengujian sebagai berikut.

Tabel 5. Pemilihan Model Data Panel

Uji Model	Hasil	Keterangan
Uji Chow	Prob>F0,0000	Nilai prob 0,0000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga *Fixed Effect Model* yang terpilih
Uji Hausman	Prob>chi2 = 0,4400	Nilai prob>chi2 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga *Random Effect Model* yang terpilih
Uji *Lagrange Multiplier*	Prob>chibar2 = 0,0000	Nilai prob>chibar lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga *Random Effect Model* yang terpilih

Sumber: Data olahan STATA, 2023.

Uji Asumsi Klasik

Setelah analisis deskriptif dan pemilihan model penelitian, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik terhadap model. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sampel sampel penelitian telah terbebas dari pelanggaran. Ketika penelitian telah terbebas dari 4 uji asumsi kelasik yang mencakup normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi maka persamaan regresi dapat bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pelangaran pada salah satu uji asumsi dapat menyebabkan pengambilan keputusan hipotesis dengan Uji F dan Uji T menjadi bias.

Tabel 6. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Prob. Nilai	Interpretasi
Skewness and Kurtosis Tests	0,6710	Data berdistribusi secara normal
Variance Inflation Factor (VIF)	8,66	Tidak terdapat gejala multikolinearitas
Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test	0,1132	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Breusch–Godfrey LM test	0,8598	Tidak terdapat gejala autokorelasi

Sumber: Data olahan STATA, 2023.

Pengujian pada Tabel 6 menunjukan bahwa model yang digunakan telah memenuhi keempat uji asumsi klasik yang dilakukan. Pada uji VIF, meskipun nilai rata-rata seluruh variabel kurang dari 10, namun variabel kepadatan penduduk dan IPM memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi antar variabel dalam model penelitian yang dapat menyebabkan *standard error* semakin besar. Menurut Markidakis (dalam Nurdin & Sugiman, 2018) salah satu cara untuk mengatasi gejala multikolinearitas adalah menggunakan metode *ridge regression*. Setelah dilakukan modifikasi dengan metode *ridge regression*, seluruh variabel yang diujikan dalam penelitian ini telah bebas dari masalah multikolinearitas. Dengan kata lain, varian data dari model yang digunakan bersifat homogen, nilai variabel pada waktu t tidak berkorelasi dengan variabel pada waktu t-1, berdistribusi normal, serta tidak terdapat korelasi antar variabel.

Adjusted R-squared penelitian ini sebesar 0,8211 atau sekitar 82,11%. Dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen yang diujikan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen sebesar 82,1%. Adapun 17,9% lainnya merupakan variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini. Dari model *ridge regression* yang digunakan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7. Analisis Regresi *Ridge Regression Model*

KM	Coef	Std. Err	t	P > | t |	[95% Conf. Interval]	
LPP	-0,5118695	0,2208279	-2,32	0,024	-0,9528933	-0,0708458
KPLog	0,1997693	0,4770481	0,42	0,677	-0,7529615	1,1525
RS	0,7398844	0,1311117	5,64	0,000	0,4780363	1,001732
TPT	-0,3634988	0,0653512	-5,56	0,000	-0,4940142	-0,2329834
IPM	-0,2760984	0,0930314	-2,97	0,004	-0,461895	-0,0903018
PDRBLog	-0,1577771	0,2785722	-0,57	0,573	-0,7141242	0,3985699
_cons	-46,48774	16,9965	-2,74	0,008	-80,43208	-12,54339

Sumber: Data olahan STATA, 2023.

Hasil pengujian menunjukan bahwa secara simultan variabel variabel Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, PDRB, IPM, Rasio Jenis Kelamin dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat dari nilai Prob > chi2 sebesar 0,0000 (kurang dari alpha 5 persen). Selain secara simultan, pengaruh variabel pun dapat dilihat

secara parsial melalui uji t. Pada uji t, apabila nilai P > | t | kurang dari alpha, maka variabel independen tersebut dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Berdasarkan hasil penelitian, variabel Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Jenis Kelamin (RS) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Sementara, variabel Kepadatan Penduduk (KP) dan PDRB secara parsial tidak berpengaruh kemiskinan di Provinsi Banten. Adapun persamaan regresi data panel dengan Ridge Regression Model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$-46.49\ KM\ = -\ 0.51\ LPP_{it} + 0.20\ ln\ KP_{it} - 0.28\ IPM_{it} - 0.36\ TPT_{it} - 0.16\ \ ln\ PDRB_{it} +\ 0.74\ RS +\ \varepsilon_{it}$$

Pada model di atas, nilai konstanta sebesar -46,48774 dapat diartikan bahwa tanpa adanya variabel Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, PDRB, IPM, Rasio Jenis Kelamin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka maka nilai kemiskinan di Provinsi Banten akan mencapai rasio sebesar -46,48774. Variabel laju pertumbuhan penduduk memiliki konstanta -0,5118695, tanda negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan berlawanan arah antara laju pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan di Provinsi Banten. Dalam artian, apabila laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan sebesar 1% maka kemiskinan akan menurun sebesar 0,5118695% (asumsi *ceteris paribus*). Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki konstanta -0,3634988, tanda negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan berlawanan arah antara tingkat pengangguran terbuka dengan kemiskinan di Provinsi Banten. Artinya, dengan asumsi variabel lainnya tetap, pada saat porsi tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan menurun sebanyak 0,3634988%. Sejalan dengan variabel tingkat pengangguran terbuka dan laju pertumbuhan penduduk, variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki tanda negatif dengan konstanta -0,2760984 yang berarti peningkatan 1% pada Indeks Pembangunan Manusia akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,2760984% (asumsi variabel lainnya konstan). Di sisi lain, terdapat hubungan positif antara variabel rasio jenis kelamin dengan kemiskinan. Dengan asumsi *ceteris paribus*, untuk setiap 1% peningkatan rasio jenis kelamin disertai dengan peningkatan kemiskinan sebesar 0,7398844%. Selanjutnya, variabel kepadatan penduduk memiliki konstanta 0,1997693, tanda positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara kepadatan penduduk dengan kemiskinan di Provinsi Banten. Dengan kata lain, apabila kepadatan penduduk mengalami peningkatan sebesar 1% maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0,1997693% (asumsi *ceteris paribus*). Sedangkan, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki konstanta negatif sebesar -0,1577771 yang menunjukan hubungan berlawanan arah antara PDRB dengan kemiskinan di Provinsi Banten. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel lainnya tetap, untuk setiap 1% peningkatan PDRB akan menurunkan kemiskinan sebanyak 0,1577771%.

Laju Pertumbuhan Penduduk Dalam Mempengaruhi Kemiskinan

Laju pertumbuhan penduduk dan kemiskinan merupakan dua hal yang saling terkait dalam pengembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Hubungan antara keduanya sangat kompleks, dan berbagai penelitian telah mencoba untuk menggambarkan pengaruhnya. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukan pengaruh pengaruh negatif dan signifikan dari variabel laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2010-2019. Dengan kata lain, peningkatan laju pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh penurunan kemiskinan dan begitupun sebaliknya.

Terdapat beberapa penjelasan atas pengaruh negatif laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan. Pertama, sesuai Teori Kuznets (1960, dalam Ablordeppey, 2021) pertumbuhan penduduk akan menciptakan surplus tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dalam faktor produksi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan kemiskinan. Tentunya kondisi ini dapat terjadi apabila pertumbuhan penduduk diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai. Penelitian Triani & Andrisani (2019) dan Zulfanetti et al (2020) menunjukan semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak tenaga kerja yang tersedia baik untuk angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja sehingga jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar.

Kedua, selain menyediakan surplus tenaga kerja, pertumbuhan penduduk juga berarti peningkatan jumlah konsumen barang dan jasa (Yao & Liu, 2022). Menurut Keynes, konsumen yang lebih banyak dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, meningkatkan permintaan modal, serta menciptakan peluang bisnis bagi masyarakat (Menike, 2018). Bahkan, Arthur Lewis (1954) meyakini bahwa pertumbuhan penduduk akan mempercepat pembangunan ekonomi. Hal ini disebut sebagai efek pasar dalam pertumbuhan penduduk yang dapat memberikan peluang bisnis serta peningkatan pendapatan bagi individu dan perusahaan.

Ketiga, selama diimbangi dengan pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang baik, pertumbuhan penduduk merupakan sumber daya utama yang dapat menjadi aset ekonomi (Simon, 1981). Penduduk

berusia muda umumnya memiliki inovasi dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Sejalan dengan argumen ini, mayoritas penduduk di Provinsi Banten termasuk dalam kategori penduduk usia produktif. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan bahwa per bulan Juni 2021 Banten memiliki total penduduk sebanyak 11,79 juta jiwa dan 7,42 juta jiwa atau sekitar 62,93% diantaranya merupakan penduduk usia produktif (Kusnandar, 2021). Oleh karena itu, masyarakat Provinsi Banten memiliki tingkat produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.

Dengan demikian, disaat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat membawa risiko kemiskinan, di sisi lain pertumbuhan yang dikelola dengan baik dan diimbangi dengan peluang ekonomi dapat memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan tergantung pada kebijakan pemerintah yang cerdas dan alokasi sumber daya yang tepat guna untuk mendukung potensi positif dari pertumbuhan penduduk tersebut. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti (2015), Didu & Fauzi (2016), Usman & Diramita (2018), dan Ristika et al (2021) yang menyimpulkan hubungan negatif antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan.

Rasio Jenis Kelamin Dalam Mempengaruhi Kemiskinan

Hasil uji statistik menunjukan korelasi positif antara variabel rasio jenis kelamin dan variabel kemiskinan. Dengan nilai *p-value* lebih kecil dari 5%, pengaruh rasio jenis kelamin terhadap kemiskinan adalah signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmani (2021) dengan simpulan *gender ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengaruh positif rasio jenis kelamin mengindikasikan setiap peningkatan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan perempuan akan disertai peningkatan kemiskinan, dan sebaliknya. Dengan mayoritas penduduk laki-laki maka produktivitas akan meningkat. Namun di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan masalah sosial berupa ketidakseimbangan gender. International Labour Organization (2004) menyatakan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai salah satu akar kemiskinan.

Peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang dapat menyebabkan diskriminasi gender yang lebih besar sehingga berdampak pada berbagai aspek kehidupan perempuan. Pertama, akses perempuan dalam memperoleh pendidikan untuk membekali dirinya dalam kehidupan. Dalam budaya patriarki dimana istri berperan sebagai istri dan ibu yang tinggal di rumah, memperoleh pendidikan yang tinggi bukanlah prioritas bagi perempuan sehingga akses terhadap pendidikan menjadi terbatas (Valentina et al., 2022).

Kedua, terbatasnya akses perempuan atas jenis pekerjaan tertentu. Pekerja perempuan cenderung dibatasi untuk bekerja di sektor formal (Hartini, 2012), sehingga sebagian besar berada di sektor informal dengan bekerja di rumah maupun dalam bentuk UMKM (Kemenpppa, 2016). Dan ketiga, terbatasnya akses terhadap kesehatan. Perempuan kerap diabaikan dalam memperoleh akses kesehatan dan nutrisi yang memadai sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dan akhirnya membebani secara ekonomi.

Lebih lanjut, diskriminasi gender mempengaruhi tingkat keamanan hidup sehingga perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi yang merugikan. Sepanjang tahun 2019, tindak kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan sebesar 431.471 kasus yang turut menjerat perempuan dalam gubangan kemiskinan (Sinombor, 2020). Pada akhirnya, diskriminasi gender menghambat potensi perempuan dan menyebabkan kemiskinan yang lebih tinggi (Duflo, 2012). Hal ini sejalan dengan teori Todaro dan Smith (2011) yang menyatakan mayoritas penduduk miskin merupakan perempuan sehingga perempuan kerap kali dirupakan sebagai wajah kemiskinan.

Kepadatan Penduduk Dalam Mempengaruhi Kemiskinan

Kepadatan penduduk, yang mengacu pada jumlah penduduk dalam suatu wilayah per unit luas tanah, tidak selalu berdampak langsung pada tingkat kemiskinan. Hasil pengujian menunjukan variabel kepadatan penduduk memiliki korelasi positif terhadap variabel kemiskinan. Pada level signifikansi 5%, variabel kepadatan penduduk memiliki nilai *p-value* lebih besar dari α, sehingga pengaruhnya terhadap kemiskinan adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Agustina et al (2018), Elvira et al (2021), dan Urrahman et al (2022).

Umumnya, kepadatan penduduk yang tinggi menciptakan tekanan pada sumber daya ekonomi dan infrastruktur yang terbatas, sehingga meningkatkan risko kemiskinan. Namun, terdapat kondisi di mana kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sebagaimana temuan pada penelitian ini. Faktor utama yang menyebabkan fenomena ini adalah keberagaman ekonomi dan kebijakan distribusi pendapatan yang efektif. Pada negara-negara dengan struktur ekonomi yang kuat dan kebijakan distribusi pendapatan yang adil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengakomodasi populasi yang padat tanpa meningkatkan angka kemiskinan. Ketika ekonomi berkembang dan ada peluang kerja yang cukup, pertumbuhan populasi tidak selalu berarti peningkatan kemiskinan asalkan ada distribusi kekayaan

dan peluang kerja yang merata. Sebagai contoh, Singapura dan Belanja yang merupakan negara maju dengan kepadatan penduduk yang tinggi namun memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Hal ini disebabkan pemerintah Singapura yang menyediakan infrastruktur yang baik, lapangan pekerjaan yang memadai, serta sistem layanan sosial yang berfungsi optimal.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan pola distribusi pendapatan juga memainkan peran penting dalam pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan, yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan tingkat kemiskinan yang rendah karena mereka mengelola pertumbuhan penduduk dengan bijak dan menginvestasikan sumber daya dengan efisien (World Bank, 2021).

Selain itu, kebijakan sosial yang efektif, bantuan sosial, dan program-program pemberdayaan ekonomi juga dapat mengurangi dampak negatif dari kepadatan penduduk terhadap kemiskinan. Dengan pendekatan yang bijaksana terhadap pertumbuhan penduduk dan implementasi kebijakan yang mendukung masyarakat padat penduduk, negara dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan populasi dan penurunan tingkat kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Mempengaruhi Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia, disingkat IPM, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita. Hasil penelitian menunjukan variabel IPM memiliki korelasi negatif dengan variabel kemiskinan. Dengan nilai *p-value* lebih kecil dari level signifikansi 5% maka pengaruh IPM terhadap kemiskinan adalah signifikan. Oleh karena itu, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gandasari & Syaifullah (2016), Prasetyoningrum & Sukmawati (2018), Sastraningsih et al (2020), Nurjati (2021), Hasanah et al (2022), dan Ramdhani et al (2022).

Hubungan antara IPM dan kemiskinan merupakan hal krusial yang menggambarkan dimensi kesejahteraan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Peningkatan IPM umumnya mencerminkan peningkatan terhadap akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas menjadi jalan menuju pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang besar, yang pada gilirannya dapat membantu mereka menghindari kemiskinan (Todaro & Smith, 2014).

Selanjutnya, komponen kesehatan dalam IPM mencerminkan tingkat kesehatan penduduk. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan gizi yang memadai dapat mengurangi angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan yang lebih baik memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara produktif dan menghindari pengeluaran besar untuk perawatan medis yang dapat memperburuk kemiskinan (The World Bank, 2019). Nurlita et al (2017) menuturkan bahwa perbaikan pada bidang kesehatan dan pendidikan akan berdampak pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan para pekerja sehingga sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Lebih lanjut, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Sehingga semakin tinggi kualitas hidup manusia akan mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Komponen IPM yang ketiga yaitu pendapatan yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan individu dan rumah tangga dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara langsung dengan memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih besar. Pendapatan yang lebih tinggi juga memberikan keluarga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak (The World Bank, 2019).

Berbekal pendidikan dan kesehatan yang baik maka pendapatan yang tinggi dapat dicapai dengan mudah. Sebaliknya, dengan pendapatan yang tinggi maka masyarakat akan lebih leluasa untuk mengeluarkan dana kesehatan dan pendidikan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Oleh karena itu, dapat disimpulkan peningkatan IPM berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dalam Mempengaruhi Kemiskinan

Hasil pengujian menunjukan korelasi negatif antara variabel tingkat pengangguran terbuka dan variabel kemiskinan. Adapun nilai *p-value* lebih kecil dari 5% sehingga pengaruhnya adalah signifikan. Dengan demikian, variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasballah (2021), Padli (2021), Wintara & Masbar (2021), Al Faruq & Yuliana (2022), Damayanti & Perdini (2022), Prasetya & Sumanto (2022), Utami et al (2022), dan Dahliah (2023).

Umumnya, peningkatan pengangguran akan disertai dengan peningkatan kemiskinan. Namun temuan dalam penelitian ini menunjukan sebaliknya dimana peningkatan pengangguran justru menyebabkan penurunan kemiskinan. Hal ini tidak biasa dan jarang terjadi kondisi normal, namun terdapat beberapa argumen yang mendukung temuan ini. Pertama, apabila peningkatan pengangguran diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan yang tersedia seperti peningkatan upah atau lebih banyak pekerjaan formal yang terbuka, maka orang yang sebelumnya menganggur dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan pendapatannya (Permatasari, 2018). Hal ini dapat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan dalam jangka pendek.

Kedua, adanya intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah berupaya memberikan program dukungan sosial untuk membantu individu yang kehilangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap kemiskinan. Di Indonesia, terdapat berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras bagi rakyat miskin (Raskin), serta program lainnya yang diinisiasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2011).

Ketiga, perkembangan teknologi dan informasi yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan inovasi dalam sektor-sektor tertentu. Adanya otomatisasi dan teknologi baru dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek sehingga meningkatkan pengangguran struktural (Baumol & Wolff, 1998). Namun, di sisi lain hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada sektor lainnya (Muchdie, 2016). Selain itu, pemerintah pun turut campur dengan memberikan berbagai pelatihan bagi pekerja yang terdampak sehingga mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang.

Lebih lanjut, permasalahan kemiskinan tidak selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan (Mukhtar et al., 2019). Padli (2021) mengungkapkan bahwa tidak selamanya orang yang tidak memiliki pekerjaan merupakan orang miskin dan bergitupun sebaliknya. Sebagai contoh, pekerja di wilayah perkotaan cenderung bekerja sesuai dengan tingkatan pendidikannya sehingga menolak pekerjaan yang lebih rendah karena memiliki sumber pendanaan lain untuk menunjang kehidupannya (Hasballah, 2021). Kelompok ini termasuk sebagai pengangguran namun tidak termasuk orang miskin. Selain itu, Hilmi et al (2022) menambahkan adanya beberapa kelompok pengangguran mulai dari mereka yang tengah mencari pekerjaan, tengah mempersiapkan usaha, telah menyerah, maupun mereka yang telah medapat pekerjaan namun belum mulai bekerja. Sebagian diantaranya merupakan pekerja di sektor informal dan pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Sehingga para pekerja tersebut tidak tercatat dalam sistem ketengarakerjaan sebagai pekerja namun memiliki pendapatan untuk membiayai hidupnya.

Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mempengaruhi Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan PDRB ADHK, dianggap sebagai cerminan kemakmuran suatu negara. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan produktivitas masyarakat dengan demikian konsumsi masyarakat akan meningkat dan menjauhkan masyarakat dari kemiskinan. Hasil pengujian statistik menunjukan korelasi negatif antara variabel PDRB dengan variabel kemiskinan. Dilihat dari nilai *p-value* yang lebih besar dari level signifikansi penelitian, pengaruh PDRB terhadap kemiskinan adalah tidak signifikan. Dengan demikian, variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muloka et al (2012), Pananrangi (2012), Barika (2013), Asawidya (2015), Zuhdiyati et al (2017), Pangiuk (2018), Prasetyoningrum & Sukmawati (2018), Purnomo & Istiqomah (2019), Faisal (2020), Safitri et al (2022), Mufidah et al (2022), dan Arwani et al (2023).

Temuan ini menjadi pembuktian atas Hipotesis Kuznets di Provinsi Banten periode 2011-2019 dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan dan kemiskinan dalam jangka waktu tertentu (Firmansyah, 2021). Dalam konteks ini, terdapat beberapa argumentasi yang mendukung temuan ini. Pertama, distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga perekonomian yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang atau wilayah tertentu saja (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Jika pertumbuhan ekonomi hanya terfokus pada sektor maupun wilayah tertentu, sementara masyarakat tetap berada di sektor yang kurang berkembang, maka pertumbuhan ekonomi tidak memberikan manfaat bagi orang miskin serta kesenjangan ekonomi dan sosial akan tetap tinggi (Ravallion, 2012). Kajian Fiskal Regional menunjukan adanya ketimpangan pembangunan yang tajam antara wilayah utara dan wilayah selatan Banten, dimana wilayah utara didominasi sektor industri sementara wilayah selatan ditopang oleh potensi Sumber Daya Alam (Badan Kebijakan Fiskal, 2020). Hal ini menunjukan pertumbuhan ekonomi yang terpusat di wilayah tertentu sehingga tidak berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Kedua, kurangnya akses pendidikan dan kesempatan kerja yang merata. Selain ketimpangan pendapatan, Provinsi Banten menghadapi masalah ketimpangan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi tanpa diimbangi dengan akses pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang mumpuni menyebabkan kurangnya daya saing masyarakat dalam persaingan di pasar tenaga kerja . Sebagai contoh, Kabupaten Lebak perlu mendapatkan perhatian khusus karena kondisi pendidikan masyarakatnya yang cukup tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Hingga saat ini, masyarakat suku Baduy belum sepenuhnya menerima pendidikan formal secara terbuka (Nugrahaeni, 2022). Lebih lanjut, adanya kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagian besar ditopang oleh konsumsi dibandingkan investasi (Barika, 2013). Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas sehingga belum mampu mengurangi angka kemiskinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kependudukan dan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Banten periode 2011-2019. Dengan menggunakan model regresi data panel dan metode *Ridge Regression Model*, diperoleh hasil penelitian bahwa variabel laju pertumbuhan penduduk, IPM, rasio jenis kelamin, PDRB, tingkat pengangguran terbuka dan kepadatan penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Secara parsial, variabel laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan IPM masing-masing berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, variabel rasio jenis kelamin berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Adapun variabel PDRB dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Implikasi dari penelitian ini bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten, pemerintah dapat memfokuskan kebijakannya pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Dengan demikian penduduk memperoleh kesempatan untuk meraih pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi. Pertama, penelitian ini belum mencakup pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga penelitian mendatang dapat menggunakan metode berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih holistik. Kedua, kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi waktu penelitian sehingga penelitian mendatang dapat menganalisis pengaruh variabel independen pra dan pasca adanya pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Ablordeppey, S. (2021). *Population Growth and Its Effect on Labour Productivity in Ghana*. University of Lethbridge.

Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *4*(2), 265–283.

Faruq, M. Al, & Yuliana, I. (2023). The Effect of Population Growth on Poverty Through Unemployment in East Java Province in 2017-2021. *Journal of Social Research*, *2*(6). http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr

Arwani, A., Safi'i, M. A., Zawawi, Tamara, K., & Masrur, M. (2023). Development of Economic Growth Model Reducing Poverty inCentral Java Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, *8*(3), 1–24. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1134

Asawidya, P. A. (2015). *The Effect of Economic Growth, Education, and Government Expenditure on Poverty in Indonesia*. University of Brawijaya.

Asmara, A., & Suci, S. C. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, *6*(1).

Astuti, R. R. (2015). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012*.

Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Kajian Fiskal Regional*.

Barika. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, *5*(3), 27–36.

Baumol, W. J., & Wolff, E. N. (1998). Side Effects of Progress, How Technological Change Increases the Duration of Unemployment. *Economics Public Policy Brief Archive* . http://www.levy.org/docs/hili/41a

Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(2), 872. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244

BPD Provinsi Banten. (2022, July 21). *Penduduk Miskin Provinsi Banten Turun*. Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

BPS Provinsi Banten. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. BPS Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/indicator/6/157/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html

BPS RI. (2023). *Kemiskinan*. BPS RI. https://sulut.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html

Dahliah. (2023). The Effect of Human Capital and Unemployment on Poverty Through Economic. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *16*(1), 45–66.

Damayanti, A., & Perdini, W. L. F. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Malang. *Journal Of Economics*, *2*(1), 1–15. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent

Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Untirta*, *6*(1), 100–114. http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/

Duflo, E. (2012). Women's empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature*, *50*(4), 1051–1079.

Safitri, S. E., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(4), 259–274. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30

Elvira, A., Murtala, & Yahya, A. (2021). Analysis of Affecting Factors Poverty Rate in The Province Sumatera Island. *IJEBAS: International Journal of Economics, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration*, *1*(2), 277–241.

Valentina, R. F., Setyawan, K. G., Sarmini, & Imron, A. (2022). Studi Tentang Akses Menempuh Pendidikan Tinggi Bagi Perempuan. *Dialektika Pendidikan IPS*, *2*(2), 35–47.

Faisal, M. (2020). The Analysis of Economic Growth, Unemployment Rate and Inflation on Poverty Levels in Indonesia (Using the Vector Error Correction Model (VECM) Method). *Journal of Maliksussaleh Public Economics*, *3*(2), 42–50. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/Jompe

Fauzi, R. N., Desmawan, D., & Febriani, R. K. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EBISMEN Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* , *1*(1), 118–122.

Firmansyah, M. F. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dalam Penentuan Basis Ekonomi, Isu Ketimpangan dan Lingkungan di Jawa Barat Periode 2010-2019. *Jambura Economics Education Journal*, *3*(1), 8–27.

Gandasari, T. R., & Syaifullah. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *6*(2), 236–255. http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/

Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Balai Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartati, N. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2010 – 2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *5*(1), 92–119.

Hartini, T. (2012). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan : Keluar dari Kemiskinan. *Jurnal Perempuan*, *17*(3).

Hasanah, E., Panjawa, J. L., & Prakoso, J. A. (2022). How Human Development Effect Poverty Alleviation in Origin and Expansion Regions? *MIMBAR Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *38*(1), 90–88. https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.8

Hasballah, I. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota. *Jurnal Al-Fikrah*, *10*(1), 38–48.

Hilmi, Marumu, Moh. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, *1*(1), 20–27.

Huda, M. A. (2013, November 26). *Pertumbuhan Penduduk di Kota Tangsel Tinggi karena Urbanisasi*. Republika. https://news.republika.co.id/berita/mwvlmk/pertumbuhan-penduduk-di-kota-tangsel-tinggi-karena-urbanisasi

ILO. (2004). *Jender dan Kemiskinan*.

Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata.* . Anak Hebat Indonesia.

Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Rajagrafindo Persada.

Kabul, L. Muh. (2019). Manajemen Pembangunan Kependudukan: Koreksi Terhadap Teori Malthus. *Ganec Swara*, *13*(2), 317–325. http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/

Kemenpppa. (2016). Akses Terhadap Pasar Tenaga Kerja. In *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*. KPP dan PA.

Kristiana, N. (2021). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019. *Jurnal PAradigma Multidisipliner (JPM)*, *2*(3).

Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN.

Kusnandar, V. B. (2021, December 20). *Penduduk Usia Produktif Banten Mencapai 62,93% pada Jun 2021*. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/20/penduduk-usia-produktif-banten-mencapai-6293-pada-jun-2021

Kuznets, S. (1960). Population Change and Aggregate Output. In *Demographic and Economic Change in Developed Countries* (pp. 324–351). Columbia University Press.

Leasiwal, T. C. (2013). Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika*, *VII*(2), 196–303.

Leiws, A. W. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, *22*(2), 139–191. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x

Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. UPP STIM YKPN.

Marini, T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, *12*(1), 108–137.

Menike, H. R. A. (2018). A Literature Review on Population Growth and Economic Development. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, *5*(5), 67–74.

Muchdie. (2016). The Impact of Technological Change on Poverty Alleviation in Indonesia. *The 2nd International Multidisciplinary Conference* . https://doi.org/10.1596/1813-9450

Mufidah, R., Asrudi, & Susiani. (2022). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, *10*(2), 521–527.

Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). The Analysis of The Effects of Human Development Index and Opened Unemployment Levels to The Poverty in Indonesia. *Jurnal Ecoplan*, *2*(2).

Muloka, D., Kogida, M., Asida, R., & Lilya, J. (2012). Is economic growth sufficient for poverty alleviation? Empirical evidence from Malaysia. *Cuadernos de Economía*, *35*(97), 26–32.

Negara, A. K. K., & Putri, A. K. (2020). Analisis Sektor Unggulan Kecamatan Toboali dengan Metode Shift SHare dan Location Quotient. *Equity: Jurnal Ekonomi*, *8*(1), 24–36. https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.11

Nugrahaeni, A. (2022, September 28). *Analisis Litbang "Kompas" : Menyoal Ketimpangan Pendidikan di Banten*. Kompas. https://www.kompas.id/baca/riset/2022/09/27/analisis-litbang-kompas-menyoal-ketimpangan-pendidikan-di-banten

Nurdin, I., & Sugiman, S. (2018). Penerapan Kombinasi Metode Ridge Regression (RR) dan Metode Generalized Least Square (GLS) untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas dan Autokorelasi Info Artikel. *Jurnal MIPA*, *41*(1), 58–68. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM

Nurjati, E. (2021). The Socioeconomic Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *37*(2), 71–80. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/8024

Nurlita, C. A., Musa, A. H., & Suharto, R. B. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin di Samarinda. *JIEM*, *2*(1). https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/issue/view/51

Nyasulu, G. (2010). Revisiting the definition of poverty. *Journal of Sustainable Development in Africa*, *12*(7), 147–158.

Oktaviana, N., & Amalia, N. (2018). Gross Regional Domestic Product Forecast Using Trend Analysis: Case Study of Bangka Belitung Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *19*(2), 142–151. https://doi.org/10.18196/jesp.19.2.5005

Padli. (2021). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, *4*(1), 615–634.

Pananrangi, A. I. A. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Plano Madani*, *1*(1), 29–38.

Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, *2*(2), 44–66. http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam

Permatasari, C. L. (2018). Strategi Peningkatan Kesempatan Kerja Berbasis Potensi Wilayah. *Ecodunamika*, *1*(2). https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/1593

Prasetya, G. M., & Sumanto, A. (2022). Pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomiPengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *19*(2), 467–477.

Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengagguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(2), 217–240.

Provinsi Banten. (2021, February 17). *Angka Kemiskinan Provinsi Banten Terendah Kedua se-Pulau Jawa*. Bantenprov.Go.Id. https://www.bantenprov.go.id/pressrealease/angka-kemiskinan-provinsi-banten-terendah-kedua-se-pulau-jawa

Purnomo, S. D., & Istiqomah. (2019). Economic Growth and Poverty: The Mediating Effect of Employment. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, *12*(1), 238–252. https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.19518

Rahma, N., Rumbia, W. A., Ernawati, & Gamsir. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi Modal Manusia dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* , *7*(2), 184–192. http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP

Rahmani, A. R. (2021). *Pengaruh Gender Ratio, Dependency Ratio, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2017*. Universitas Brawijaya.

Ramadhani, G. S., Nur, H., & Haryani. (2019). Karakteristik Kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Buana*, *3*(4), 869–881.

Ramdhani, N., Anggraeni, Y., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, *1*(2), 136–144.

Ravallion, M. (2012). Why Don't We See Poverty Convergence? *American Economic Review*, *102*(1), 504–523.

Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(2), 129. https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254

Ruchmawati, S., & Tuasela, A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Harga Tanah di Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis* , *1*(1), 1–15.

Safitri, E., Yunus, M., Taufan, A., & Hayati. (2022). Analysis of Economic Growth, Open Unemployment Rate and Poverty Rate Using Technology. *Jurnal Ipteks Terapan*, *16*(4), 703–708. https://doi.org/10.22216/jit.v1

Santika, E. F. (2023, July 24). *10 Provinsi Sasaran Perpindahan Penduduk, Jawa Barat Terbanyak*. Databoks.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/24/10-provinsi-sasaran-perpindahan-penduduk-jawa-barat-terbanyak

Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium* , *10*(2), 121–130.

Sasana, H., & Rudibdo. (2017). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Eks-karesidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, *2*(2), 215–226.

Sastraningsih, E., Rosyadi, M. I., & Prakoso, W. D. (2020). The Impact of Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Riau Province. *Journal of Economics and Sustainable Development*, *11*(4), 157–164. https://doi.org/10.7176/jesd/11-4-18

Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *10*(2), 59–72.

Shalehah, S. A. J., Muttalib, A., & Nasrullah. (2017). Pengaruh Faktor Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Output Marginal pada Pander Jaya Mebel. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(1), 130–139. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/profitability

Shaulim. (2022). Pengaruh Hasil Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus : Kabupaten Bengkayang). *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI*.

Sihombing, P. R. (2022). *Aplikasi Stata Untuk Statistisi Pemula*. Gemala.

Simon, J. L. (1981). *The ultimate resource*. Princeton University Press .

Sinombor, S. H. (2020, March 7). *12 Tahun, Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat*. Kompas.Com. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/03/07/12-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat

Solihin, D. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Yayasan Empat Sembilan Indonesia.

The World Bank. (2019). *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*.

The World Bank. (2023, July 12). *Progress, challenges in ending extreme poverty*. The World Bank.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2023). *Program Bantuan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan*. https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/34.%20nov2011%20PROGRAM%20BANTUAN%20SOSIAL%20dan%20PENANGGULANGAN%20KEMISKINAN-1.pdf

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed., Vol. 1). Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.

Triani, M., & Andrisani, E. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Upah Terhadap Penawaran Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Geografi* , *8*(1), 49–54.

Urrahman, M. Z., Maryam, S., & Irwan, M. (2022). The Effect Of Inflation, Unemployment, And Population Density On Poverty In West Nusa Tenggara. *IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, *9*(4), 75–85. www.ijiset.com

Usman, U., & Diramita. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* , *1*(2), 46–52.

Utami, N. D., Nurfalah, R., & Desmawan, D. (2022). Analisis Adanya Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021. *EBISMEN Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, *1*(3), 162–175.

Wenagama, I. W., & Yanthi, N. P. D. W. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Distribusi Pendapatan, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *11*(6), 651–658. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index

Wintara, H., & Masbar, R. (2021). Determinants of Socio Economic and Demographic Characteristics of Poverty in Aceh Province. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, *2*(2), 50–56.

World Bank. (n.d.). *Poverty and Inequality*. The World Bank. Retrieved January 20, 2023, from https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/poverty-and-inequality.html

Yao, Y., & Liu, L. (2022). Research on Population Mobility and Sustainable Economic Growth From a Communication Perspective. *Front Psychol*.

Zuhdiyati, N., David, D., Faktor -Faktor, A., Mempengaruhi, Y., Zuhdiyaty, N., Program, A., Ekonomi, P. I., Ekonomi, F., Bisnis, D., Brawijaya, U., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jibeka* , *11*(2), 27–31.

Zulfanetti, Muchlis, F., Rendra, & Wibisono, E. (2020). Demand and supply analysis of labor in the agriculture, mining and industrial sector in Jambi Province, Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *8*(2), 125–138.